

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Akan Lambungkan Pajak Air Tanah

“Ada yang menyebut bisa sampai lebih dari seribu persen.

Avit Hidayat

avit.hidayat@tempo.co.id

JAKARTA – Pemerintah DKI Jakarta sedang merancang kenaikan setinggi mungkin pajak konsumsi air tanah. Di samping untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, rencana tersebut sekaigus untuk mengalihkan konsumsi air tanah ke air pipa.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan ada potensi pendapatan dalam jumlah besar dari sektor pajak air tanah. “Ada yang menyebut, (kenaikan pajak air tanah) bisa sampai lebih dari seribu persen,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, dua hari lalu.

Seama ini, pendapatan DKI dari pajak air tanah jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan potensinya. Tahun lalu, target pajak air tanah sebesar Rp 190 miliar. Realisasinya hanya Rp 96,6 miliar. Padahal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pernah menulis potensi pajak air tanah di Ibu Kota sekitar Rp 2,8 triliun.

Anies belum memastikan berapa persen kenaikan pajak air tanah kelak. Dia pun tak menyebutkan proyeksi pendapatan daerah dari sektor itu. Anies hanya mengatakan potensi pendapatan itu bisa dihitung dengan mengalikan jumlah penduduk Jakarta dengan jumlah konsumsi air per hari. “Manusia, ya, tentu akan mengkonsumsi air untuk kebutuhan sehari-hari. Itu yang bisa diproyeksikan,” tutur dia.

Pajak air tanah diatur

dalam peraturan daerah. Karena itu, bila hendak mengubah tarif pajak air tanah, pemerintah DKI harus mengubah peraturan daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Ketua Komisi Bidang Keuangan DPRD Jakarta, Santoso, mendukung rencana pemerintah DKI melambungkan pajak air tanah, bahkan sampai seribu persen. “Asalkan pengawasannya diperketat,” kata dia kemarin.

Menurut Santoso, pengawasan oleh pemerintah DKI atas penggunaan air tanah selama ini masih lemah. Pencurian air tanah terjadi di mana-mana. Akibatnya, pendapatan pajak air tanah jauh lebih rendah ketimbang potensi sesungguhnya. Bahkan, Santoso menduga, ada petugas pengawas yang ikut “memainkan” meteran air tanah karena menerima suap.

Santoso menambahkan, pajak air tanah juga harus dinaikkan untuk pelestarian lingkungan Ibu Kota. Penggunaan air tanah lebih merusak lingkungan dan bisa memicu penurunan permukaan tanah. Selama ini, kata dia, perkantoran, industri, pertokoan, pusat belanja, dan apartemen kebanyakan memakai air tanah untuk mencukupi kebutuhan air bersih mereka.

Laporan Balai Konservasi Air Tanah Kementerian ESDM pada 2015 mencatat bahwa penggunaan air tanah di Jakarta mencapai 61 persen dari total kebu-

tuhan air 824 juta meter kubik per tahun. Adapun Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya dan keda mitra swastanya hanya sanggup memenuhi sekitar 39 persen kebutuhan air bersih atau sekitar 328 juta meter kubik per tahun.

Dalam waktu dekat, menurut Santoso, Komisi Keuangan DPRD akan mengundang Badan Pajak dan Retribusi Daerah untuk membahas rencana kenaikan pajak air tanah serta revisi peraturan daerahnya.

Direktur Amrita Institute, Nila Ardhianie, khawatir rencana DKI menaikkan pajak air tanah memperhatikan ketersediaan air bersih alternatif. Dia khawatir rencana melambungkan pajak air tanah itu tak diimbangi dengan perbaikan jaringan pipa dan pasokan air bersih oleh PAM Jaya. Bila itu terjadi, kata Nila, “Pencurian air tanah justru akan makin marak.” ● HENDAH YO HANGGI

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN IUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

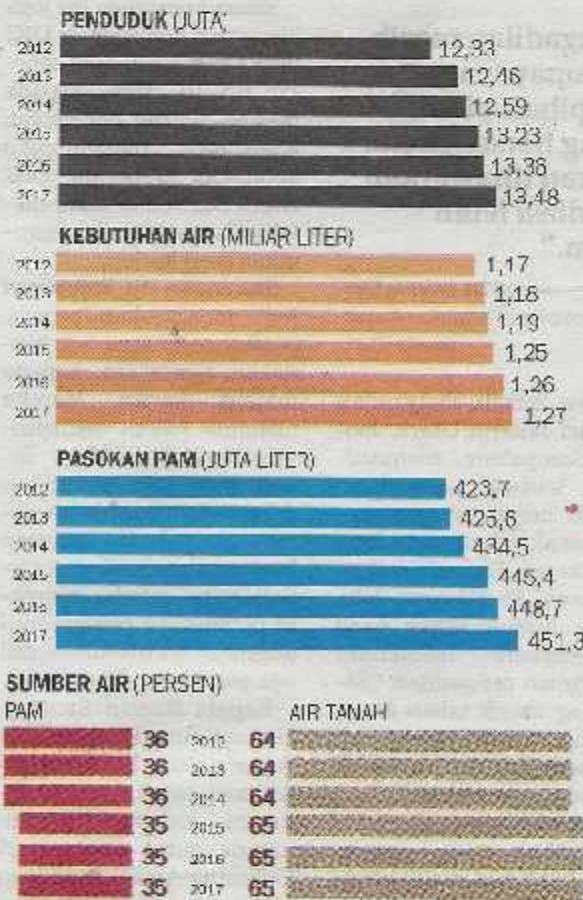
DKI Akan Lambungkan Pajak Air Tanah

Pencurian Terus Terjadi

Direktur Amrta Institute, Nila Ardhanie, sepakat dengan rencana pemerintah DKI menaikkan pajak air tanah agar masyarakat beralih mengkonsumsi air bersih dari pipa. Masalahnya, menurut Nila, sejauh ini Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya dan dua mitra swastanya belum sanggup memenuhi seluruh kebutuhan air bersih di Ibu Kota.

Berdasarkan penelitian Amrta Institute, sekitar 65 persen populasi di Jakarta masih mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan air tanah. Menilik perolehan pajak air tanah yang jauh lebih rendah daripada konsumsi air tanah, Nila meyakini pencurian air tanah terus terjadi di banyak tempat. "Pencurian jelas terjadi," kata dia.

Berikut ini data konsumsi air di Jakarta:



SRS: PAT HIDAYATI, AMRTA INSTITUTE | SUMBER: DUKAH